

ANALISIS REALISASI ANGGARAN DALAM MENILAI EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) SINGARAJA TAHUN 2016-2018

Luh Ema Pebriani

Program Studi Akuntansi Program Diploma III
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
Email : emmapebriani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan KPPN Singaraja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2018. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2016 hingga 2018 yang terkait dengan analisis realisasi anggaran dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pada KPPN Singaraja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2018. Adapun yang menjadi subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kinerja KPPN Singaraja dalam hal efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini nampak dalam analisis perbandingan dari tahun 2016-2017. Di lihat dari tahun ke tahun kurangnya tingkat efektivitas dan efisiensi antara anggaran dan realisasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pendapatan serta belanja yang di keluarkan.

Kata kunci : Anggaran, efektivitas, efisiensi, kinerja.

ABSTRACT

This study was conducted to compare the Budget Realization Reports at the Singaraja State Treasury Service Office (KPPN) from 2016 to 2018. The data used are quantitative data in the form of numbers, such as the Budget Realization Report from 2016 to 2018 related to analysis budget realization in assessing the effectiveness and efficiency of performance at Singaraja KPPN based on the 2016-2018 Budget Realization Report. The research subject contained in this study is the Singaraja State Treasury Service Office (KPPN). The data obtained were analyzed using quantitative descriptive techniques. The results of this study indicate that the lack of performance of Singaraja KPPN in terms of effectiveness and efficiency of the Budget Realization Report (LRA). This is evident in the comparison analysis from 2016-2017. It is seen from year to year that there is a lack of effectiveness and efficiency between the budget and its realization. Several factors that influence such as income and expenditure are spent.

Keywords : Budget, performance, efficiency, efektivitas.

1. Pendahuluan

Di era globalisasi daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem pertanggungjawaban serta pengelolaan keuangan daerah sendiri. Sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas penggunaan dana keuangan tersebut, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna informasi keuangan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara periodik.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah ialah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna. Menurut Dwi Prastowo (2011:7) Karakteristik dari laporan keuangan ini meliputi: dapat dipahami, relevan, keandalan serta dapat dibandingkan. Laporan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan perlu adanya publikasi, hal ini bertujuan untuk transparansi publik, sebagai informasi kepada masyarakat serta untuk memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta dapat juga memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial suatu organisasi atau perusahaan. Mewujudkan *good government* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintahan pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam artian mencapai tujuan dan sasaran (Sumengen:2012).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang telah dibuat. Analisis laporan keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat profit oriented, namun masih jarang dilakukan pada lembaga atau organisasi non-profit oriented khususnya instansi-instansi pemerintahan daerah.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai salah satu organisasi sektor publik selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai peran penting dalam proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KPPN melayani dua wilayah satuan kerja yakni wilayah kota Singaraja serta kota Jembrana. Selain bertugas dalam proses pencairan dana APBN, KPPN juga sebagai satuan kerja yang membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Metode Penelitian

Proses awal yang dilakukan adalah dimulai dari observasi yakni pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja, dari proses observasi awal tersebut maka ditetapkan rumusan masalah yang dibuat. Setelah itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, selanjutnya menganalisa data dengan metode analisis deskriptif dan kuantitatif.

Dari analisis data yang dilakukan, langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil yang diperoleh. Dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif merupakan tulisan yang berisi paparan uraian tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu. Kuantitatif merupakan data yang dapat diolah atau diukur. Sedangkan presentase merupakan data yang digunakan untuk menyajikan analisis mengenai obyek dengan presentase. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tulisan yang berisi paparan uraian tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu dimana data yang digunakan dapat diolah atau diukur dan hasil dari data yang telah dianalisis tersebut berbentuk presentase. Metode ini untuk membandingkan serta mengetahui kinerja dari analisis realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari Rasio Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran KPPN Singaraja Tahun Anggaran 2016-2018. Tahun 2016 KPPN Singaraja tidak mengganggu pendapatannya tetapi terrealisasi sebesar Rp. 18,107,656. Hal ini disebabkan karena adanya PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tidak ada anggarannya, karena KPPN bukan satker penerima PNB fungsional, dan di tahun 2016 sendiri memang belum ada estimasi pendapatan bukan pajak.

Sehingga Rasio Efektivitas tahun 2016 tidak memiliki selisih antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan. Tahun 2017 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 33.500.000 dan realisasi pendapatan Rp. 4.976.288. Selisih Anggaran pendapatan dan Realisasi Anggaran adalah sebesar Rp. 28.523.712. Dengan demikian diperoleh Rasio Efektivitas sebesar 14,85%. Dapat dikategorikan tidak efektif karena efektivitas kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.347.571, pendapatan jasa lembaga keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp. 108.643, pendapatan denda pelaksanaan rekening penerimaan bersaldo nihil Rp. 112. 814, serta pendapatan kembali persekot/uang muka gaji sebesar Rp. 3.407.260. Maka total pendapatan yang diterima tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.976.288, Ini berarti realisasi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat. Tahun 2018 Anggaran Pendapatan KPPN Singaraja sebesar Rp.8.923.155 dan Realisasi pendapatan sebesar Rp.8.923.155. Selisih Anggaran dan Realisasi Anggaran pendapatan tahun 2018 nihil.

Hal ini dikarenakan adanya *Treasury Single Account* (TSA), Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Persekot atau Uang Muka Gaji, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dan Pendapatan Anggaran Lain - Lain. Maka dari itu diperoleh hasil Rasio Efektivitas sebesar 100%, ini dapat dikategorikan efektif karena sudah mencapai 100%.

Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Laporan Realisasi Anggaran KPPN Singaraja Tahun 2016, Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.1.479.884.000 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.1.399.877.793. Selisih Anggaran Belanja Pegawai dengan Realisasi Belanja sebesar Rp.80.006.207, Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Misalnya seperti gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial. Kurang efisiennya antara anggaran belanja pegawai dan realisasinya dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai seperti tunjangan hari raya, tunjangan jabatan, tunjangan anak istri dan lain sebagainya serta kontribusi lembur.

Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.820,963,000 dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.786,428,386, Selisih Anggaran Belanja Barang dengan Realisasi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.34.534.614. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 96% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%.

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Misalnya belanja pemeliharaan fasilitas perusahaan dan belanja perjalanan. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Realisasinya dikatakan kurang efisien disebabkan oleh peningkatan belanja barang persediaan selama tahun 2016 di bandingkan tahun sebelumnya. Contohnya pembelian perangkat kerja seperti komputer.

Selanjutnya hasil perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.6.640.000 dan Realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.4.848.000. Selisih Anggaran Belanja Modal dengan Realisasi Anggaran Belanja Modal yaitu sebesar Rp.1.792.000. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 73% dikategorikan efisien karena melebihi 60%. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal dan Realisasinya dikatakan Efisien dikarenakan belanja modal pada tahun 2016 tidak begitu banyak pengeluaran baik dari belanja modal tanah, modal peralatan dan kendaraan serta belanja modal lainnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 88% dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Kinerja KPPN Singaraja tahun 2016 dianggap berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2017, Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.940.306.000 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.908.131.047. Selisih Anggaran Belanja Pegawai dengan Realisasi Belanja sebesar Rp.32.174,953 Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 98,21% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Misalnya seperti gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial. Kurang efisiennya antara anggaran belanja pegawai dan realisasinya dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai dan lembur.

Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.1.000.601.000 dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.968.598.951, Selisih Anggaran Belanja Barang dengan Realisasi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.32.002.049. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 96,80% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Misalnya belanja pemeliharaan fasilitas perusahaan dan belanja perjalanan. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang dan Realisasinya dikatakan kurang efisien. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang non operasional yang cukup signifikan disamping naiknya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.

Selanjutnya hasil perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.250.191.000 dan Realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.247.888.050. Selisih Anggaran Belanja Modal dengan Realisasi Anggaran Belanja Modal yaitu sebesar Rp.1.792.000. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 99,08% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal dan Realisasinya dikatakan Kurang Efisien dikarenakan belanja modal pada tahun 2017 banyak pengeluaran baik dari modal peralatan

dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensi di tahun 2016 sebesar 97% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kinerja KPPN Singaraja tahun 2016 dianggap kurang berhasil dalam memblanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang di tetapkan.

Pada Tahun 2018, Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 267.781.000 dan Realisasi Belanja sebesar Rp.262.998.000. Selisih Anggaran Belanja Pegawai dengan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.783.000 Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 96,58% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai dari tahun-ketahun. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.1.000.684.000 dan Realisasi Belanja Barang sebesar Rp.989.713.094, Selisih Anggaran Belanja Barang dengan Realisasi Anggaran Belanja Barang sebesar Rp.10.970.906.

Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 98,90% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Misalnya seperti gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, dan kontribusi sosial. Kurang efisiennya antara anggaran belanja pegawai dan realisasi belanja pegawai di tahun 2018 dikarenakan banyaknya tunjangan para pegawai dan lembur, akan tetapi perbandingan antara Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.262.998.000,00 dan Rp.908.131.047,00. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 71,04% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh pembayaran gaji dan tunjangan kinerja untuk seluruh pegawai KPPN Singaraja kini Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Anggaran Realisasi telah terpusat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pada TA 2018 ini juga terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp. 280.000,00.

Selanjutnya hasil perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.90.800.000 dan Realisasi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp.88.887.000.Selisih Anggaran Belanja Modal dengan Realisasi Anggaran Belanja Modal yaitu sebesar Rp. 1.913.000. Dengan demikian diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 97,89% dikategorikan efisien karena melebihi 90%. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal dan Realisasinya dikatakan Kurang Efisien dikarenakan belanja modal pada tahun 2018 yakni pada belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp. 88.887.000,00 sebesar 1163,73% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar Rp.7.017.050,00. Sedangkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dari Pagu Anggaran Sebesar Rp 0,00, sementara TA 2017 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singaraja memiliki Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.240.871.000,00. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensi Tahun Anggaran 2018 sebesar 98,3% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Kinerja KPPN Singaraja tahun 2018 dianggap kurang berhasil dalam memblanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang di tetapkan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya kinerja KPPN Singaraja dalam hal efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Hal ini nampak dalam analisis perbandingan dari tahun 2016-2017. Di lihat dari tahun ke tahun

kurangnya tingkat efektivitas dan efisiensi antara anggaran dan realisasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti pada pendapatan serta belanja yang di keluarkan. Karena itu peneliti menyarankan agar dilakukan evaluasi atas semua realisasi anggaran sehingga kedepannya dapat lebih efektif dan efisien. Peneliti juga menyarankan agar peneliti lainnya dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam lagi termasuk juga pada pengguna anggaran sehingga nantinya realisasi anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adurahmat, 2003. *"Pengertian Efisiensi"*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Dwi, Prastowo 2011. *Analisis laporan keuangan konsep dan aplikasi*. Edisi ketiga Yogyakarta : sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Halim Abdul dan Mumahad Syam Kusufi, 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- IKAPI 2011, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Bandung*
- Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mahmudi, 2013, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mulyamah, 2002. *Definisi Efisiensi*, Yogyakarta, BPFE
- Munawir, S. 2002. *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Pertama, BPFE : Yogyakarta.
- Muryanti kiky. 2015. *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Sawir, Agnes, 2001. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sawitri Made , Purnamawati.G.A, Herawati T.N. 2015. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bangli)*. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suyana Utama, Made. 2009, *Buku ajar Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Triharta A.B, 2013, *Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual dengan Entri Berpasangan, Dilampiri dengan Lampiran I PP 71 Tahun 2010*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Vol. 8, No. 2 Oktober 2019
p-ISSN:2337-537X, E-ISSN : 2686 - 1941

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara